

REFERENSI

- Akbar, Rusdi. 2004. *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Anindita, Tri Anung. 2012. "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 1, no. 1.
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J., dan Beasley, Mark S. 2014. *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach*. England: Pearson.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Pengelolaan Kelas dan Siswa: Sebuah Pendekatan Evaluatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara.
- BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 sd. Tahun 2015..
- Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. 2013. "Internal Control-Integrated Framework: Executive Summary". Diakses pada 25 September 2016. http://www.coso.org/documents/990025p_executive_summary_final_may20_e.pdf.
- Creswell, John. W., 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dimiyati dan Mudjiono. 2013. *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ekawati, Fauziah. 2015. "Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pasca Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi pajak Daerah di Kota Batu (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kota Batu)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 4, no. 2.
- Febrianto, Donny. 2013. "Evaluasi Pengendalian Intern atas Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Malang.” *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya*, Vol. 5, No. 2.

Kementerian Dalam Negeri RI. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

-----, 2013. Modul Permendagri No. 64 Tahun 2013, Modul Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

-----, 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

-----, 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. 2011. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2014. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI.

Mastuti, I Gusti Komang Rai. 2015. “Evaluasi Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Studi Kasus di Kabupaten Jembrana.” Tesis Magister. Universitas Gadjah Mada.

Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

Mustaqiem. 2008. *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.

O’Brien, James A., dan Marakas, George M. 2008. *Introduction to Information System*. Edisi keempatbelas. McGraw-Hill: New York.

Pemerintah Kabupaten Kendal. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal.

-----, 2012. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Piutang Daerah Kabupaten Kendal.

- , 2016. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Pemerintah Kabupaten Tangerang. 2011. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 56 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- , 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- , 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- , 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- , 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- , 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.
- Pratiwi, Widya. 2012. "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Bungo)." *Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim Bukittinggi*, Vol. XII, No. 2 (September).
- Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah (LKMPD).
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- , 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sudijono, Anas. 2005. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Ed. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Utami, Selfi. 2015. "Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan studi Pada Pemerintah Kabupaten Klaten." Tesis Magister. Universitas Gadjah Mada.

Yin, Robert K. 2015. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Diterjemahkan oleh M. Djazuli Mudzakir. Jakarta: Rajawali Pers.